

Evaluasi Preservasi Arsip Statis Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2011

Ulva Azzahra¹; Nurul Rahmi^{2*}

¹²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

*Korespondensi email: nurulrahmi.ami@ar-raniry.ac.id

Information

Submitted: 22-04-2025

Revised: 16-05-2025

Accepted: 09-06-2025

How to cite: Peran Stakeholder dalam Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY). (2025). TADWIN: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 6 (1), 47-65. <https://doi.org/xx>

DOI:doi.org/10.19109/tadwin.v5i1.21760

FirstPublicationRight:

Tadwin: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

Licensed:



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRACT

This article analyzes the evaluation of static archive preservation at the Library and Archives Office of Aceh Besar Regency based on Anri Head Regulation Number 23 of 2011. This research aims to find out two aspects. First, to find out the process of implementing static archive preservation at DPKA Aceh Besar Regency. Second, to find out the obstacles in the implementation of static archive preservation. In carrying out the research, the research method used is qualitative, with the type of field research. The results of the analysis show two findings. First, the process of implementing static archive preservation consists of preventive and curative preservation. Preventive preservation includes the provision of archive storage space, archive handling, pest control, disaster planning. Curative preservation is a direct action to deal with damaged archives. The evaluation process of static archive preservation is carried out with three aspects, namely identifying deficiencies in the preservation process, monitoring archives, recording complete archive data. Second, there are three obstacles to the implementation of static archive preservation, namely limited archive storage space (archive depot), limited labor or human resources (HR), and limited budget. It can be concluded that the process of implementing static archive preservation evaluation at DPKA Aceh Besar Regency is in accordance with ANRI Regulation Number 23 of 2011, although there are still obstacles regarding the lack of storage space, budget and human resources. The results of this study can deepen understanding of the concepts and principles of static archive preservation in accordance with applicable regulations and contribute to archival studies. In addition, there is a need to improve archive management in government agencies and optimize the use of archives for

the public.

Keywords: *Preservation Evaluation; Static Archives; DPKA Aceh Besar; Perka Anri.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang evaluasi preservasi arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Peraturan Kepala Anri Nomor 23 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua aspek. Pertama untuk mengetahui proses pelaksanaan preservasi arsip statis di DPKA Kabupaten Aceh Besar. Kedua, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan preservasi arsip statis di DPKA Kabupaten Aceh Besar. Dalam melaksanakan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil analisis menunjukkan dua temuan. Pertama, proses pelaksanaan preservasi arsip statis terdiri preservasi preventif dan kuratif. Preservasi preventif mencakup penyediaan ruang penyimpanan arsip, penanganan arsip, pengendalian hama, rencana menghadapi bencana. Preservasi kuratif adalah tindakan langsung menangani arsip yang rusak. Proses evaluasi preservasi arsip statis dilakukan dengan tiga aspek, yaitu identifikasi kekurangan pada proses preservasi, pemantauan arsip, pencatatan lengkap data arsip. Kedua, kendala pelaksanaan preservasi arsip statis ada tiga, yaitu keterbatasan ruang penyimpanan arsip (depot arsip), keterbatasan tenaga kerja ataupun sumber daya manusia (SDM), dan keterbatasan anggaran. Dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan evaluasi preservasi arsip statis pada DPKA Kabupaten Aceh Besar telah sesuai dengan Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2011, meskipun masih terdapat kendala tentang minimnya ruang penyimpanan, anggaran dan SDM. Hasil penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang konsep dan prinsip preservasi arsip statis sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memberikan kontribusi terhadap kajian kearsipan. Di samping itu, perlu ada peningkatan pengelolaan arsip di instansi pemerintah dan optimalisasi pemanfaatan arsip bagi publik.

Kata kunci: Evaluasi Preservasi; Arsip Statis; DPKA Aceh Besar; Perka Anri.

1. PENDAHULUAN

Arsip merupakan sekumpulan warkat yang keberadaannya disimpan secara sistematis dan biasanya terjaga dengan baik karena memiliki nilai guna (Rusidi, 2019). Secara praktis arsip dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu arsip statis dan arsip dinamis (Amsyah, 2005). Kedua bentuk arsip ini punya fungsi berbeda dan peruntukannya juga berbeda (Caroline et al., 2022). Arsip statis digunakan tidak secara langsung, dan arsip dinamis ini dipergunakan secara langsung di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Wright & Laurent, 2021).

Arsip statis dikelola dengan proses tertentu, salah satunya melalui kegiatan preservasi arsip. Preservasi arsip statis adalah proses lanjutan dari kegiatan akuisisi (Hendrawan & Ulu, 2017). Preservasi arsip statis ini bagian dari bentuk pemeliharaan terhadap arsip yang sudah diterima dari pencipta arsip (Rakemane & Mosweu, 2021). Preservasi arsip statis bagian dari keseluruhan proses pemeliharaan dalam rangka perlindungan arsip statis terhadap kerusakan (Matlala et al., 2022). Dalam studi kearsipan, usaha perawatan dan pelestarian arsip disebut dengan preservasi, yaitu upaya untuk mencegah hilangnya nilai informasi arsip (Masenya & Ngulube, 2021). Oleh karena itu, diperlukan aktivitas-aktivitas untuk menjaga dan merawat arsip (Ria & Irhandayaningsih, 2019). Pedoman pelaksanaan preservasi arsip statis diatur di dalam Peraturan Kepala (Perka) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis. Dalam Perka ini, ditetapkan bahwa pihak yang bertugas melakukan preservasi arsip adalah lembaga kearsipan. Tujuan preservasi adalah untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis.

Sementara itu, tahapan dan kegiatan yang dilakukan pada waktu preservasi arsip statis juga dikemukakan secara rinci di dalam Perka ANRI tersebut. Hal ini dapat dipahami di bagian Lampiran Perka ANRI, dinyatakan bahwa kegiatan pada proses preservasi meliputi dua aspek yaitu preservasi preventif dan kuratif. Preservasi preventif merupakan preservasi yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan arsip, melalui penyediaan sarana prasarana, perlindungan arsip dan metode pemeliharaan arsip (Rakemane & Mosweu, 2021). Preservasi kuratif adalah preservasi yang bersifat perbaikan dan atau perawatan terhadap arsip yang mulai atau sudah rusak, kondisinya memburuk, sehingga dapat memperpanjang usia arsip (Rahman & Arfa, 2021).

Proses preservasi arsip statis sangat penting dilakukan (Jaillant, 2022). Hanya saja, di dalam beberapa kasus masih ditemukan arsip statis yang harusnya mendapat perlakuan pemeliharaan dan perawatan justru tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku, atau paling kurang ditemukan adanya kendala dalam proses pelaksanaannya (Tintswalo et al., 2022). Ini dapat dilihat pada beberapa lembaga arsip, termasuk di dalamnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (dan selanjutnya ditulis DPKA) Kabupaten Aceh Besar. Arsiparis belum maksimal di dalam melaksanakan perawatan arsip. Masih terdapat beberapa ruang penyimpanan berisi tumpukan arsip yang tidak teratur. Hasil observasi juga menunjukkan keadaan arsip statis yang tidak teratur (Observasi: 13 Mei 2024).

Menurut Abdul Latif, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan Jantho Aceh Besar, bahwa sejauh ini jumlah arsip sebanyak 700 dokumen, dan dokumen ini khusus dari satu lembaga, yaitu hasil akuisisi di Dinas Pertambangan Aceh Besar. Adapun lembaga dan dinas terkait yang lainnya yang bekerja sama dengan DPKA Kabupaten Aceh Besar ialah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Besar. Se jauh ini, proses preservasi arsip statis dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tahapan yaitu proses pemilahan berkas arsip dan pemilihan media simpanan, menyampul arsip agar dokumen tersimpan secara rapi, kemudian diikat menggunakan benang jagung, memberi penomoran sesuai isi, selanjutnya diinventaris dan dimasukkan ke dalam box arsip, dan langkah terakhir yang harus dilakukan adalah penyimpanan arsip di ruangan ber AC atau ruangan dingin (Abdul Latif, Wawancara: 13 Mei 2024).

Dalam proses pelaksanaan preservasi arsip statis di DPKA Kabupaten Aceh Besar belum memiliki buku panduan dan *leaflet* khusus tentang berbagai topik preservasi, seperti kegiatan rutin dan cara membersihkan arsip dan ruang penyimpanan atau kegiatan survei pengecekan kondisi arsip dan sejenisnya. Selain itu, preservasi arsip statis juga tidak memiliki jadwal khusus dilakukannya perbaikan dan perawatan dengan segera setelah terjadi kerusakan. Di dalam proses pelaksanaan preservasi arsip statis, pihak arsiparis mengalami beberapa kendala, di antaranya ialah kurangnya anggaran (Abdul Latif, Wawancara: 13 Mei 2024). Kendala anggaran ini salah satu problematika dalam pengelolaan arsip statis dialami di DPKA Kabupaten Aceh Besar.

Pengelolaan dan preservasi arsip statis yang dilaksanakan selama ini masih bersifat tradisional, artinya tidak menggunakan teknologi. Preservasi yang dilakukan saat ini di DPKA Kabupaten Aceh Besar justru membutuhkan biaya yang relatif besar. Secara teoretis, kegiatan preservasi arsip dengan sistem *filing* tradisional (*traditional paper filing system*) memerlukan anggaran yang besar (Septiani et al., 2024), ini berbeda dengan pengelolaan dengan pengarsipan otomatis melalui digitalisasi, prosesnya tidak membutuhkan proses preservasi yang rutin, karena datanya telah melalui proses digitalisasi (Mulyadi, 2016). Selain anggaran, ruangan penyimpanan arsip statis untuk pengolahan serta penyimpanan arsip juga masih mengalami kendala (Abdul Latif, Wawancara: 13 Mei 2024). Selain itu, temuan awal juga menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan berkas arsip yang belum disusun secara rapi, pegawai, petugas atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang khusus melakukan kegiatan preservasi arsip statis juga terbatas.

Mengacu pada uraian permasalahan di atas, maka artikel ini ditulis dengan maksud/tujuan untuk menganalisis evaluasi preservasi arsip statis di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2011. Ada dua aspek yang ingin didalami, yaitu menyangkut proses pelaksanaan preservasi arsip statis di DPKA Kabupaten Aceh Besar, dan identifikasi kendala dalam pelaksanaan preservasi arsip statis di DPKA Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini, hipotesa awal bahwa DPKA Kabupaten Aceh Besar belum secara maksimal dalam melakukan proses preservasi arsip statis karena adanya kendala-kendala yang muncul yang dihadapi oleh lembaga tersebut.

Penelitian yang secara khusus menelaah evaluasi preservasi arsip statis telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti terdahulu, namun secara khusus belum menyentuh objek penelitian dan juga fokus yang dikaji dalam artikel ini. Kajian terdahulu belum mengeksplorasi tentang proses, tahapan dan langkah-langkah preservasi arsip statis, dan tidak pula melakukan identifikasi secara mendalam tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh arsiparis. Hal berbeda lainnya adalah kajian terdahulu tidak melihat secara lebih jauh relevansi dan kaitan antara proses preservasi yang ada di lapangan dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2011. Ini menjadi pembeda dan bagian dari aspek kebaruan yang diangkat dalam artikel ini, terutama dalam kaitan dengan lokasi penelitian di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Besar.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian secara umum memiliki dua bentuk, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif, yaitu mengungkapkan suatu keadaan yang alamiah atau fenomena maupun objek dalam konteksnya, dan menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam mengenai sesuatu masalah yang dihadapi yang tampak di dalam bentuk data kualitatif, baik itu berupa gambar, kata, maupun kejadian (Sugiyono, 2013; Yusuf, 2016). Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang mendalam (*in-depth*), yang berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus yang bertujuan untuk membuat satu fakta sehingga dipahami (Morissan, 2019). Terkait dengan penelitian ini pendekatan kualitatif yang peneliti maksudkan adalah peneliti hendak melihat dan mengungkapkan suatu keadaan dan fakta secara konkret dan detail tentang evaluasi preservasi arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten (DPKA) Aceh Besar dan tinjauannya terhadap ketentuan Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau *field research*.

Sumber data di dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik *observation*, *interview*, dan *document study*. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari buku, jurnal, kamus, ensiklopedia, dan peraturan perundang-undangan. Indikator yang digunakan dalam upaya menganalisis data yang sudah ditemukan terkait proses evaluasi preservasi arsip statis yang dilakukan oleh instansi DPKA Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Aspek dan Indikator Evaluasi Preservasi Arsip Statis

No.	Apek	Indikator
1	Preservasi preventif	1. Penyimpanan arsip (lokasi, struktur standar bangunan) 2. Penanganan arsip 3. Pengendalian hama terpadu (alat ukur, suhu,

		fumigasi) 4. Akses (cahaya, pembersih udara) 5. Reproduksi 6. Perencanaan menghadapi bencana
2	Preservasi kuratif	1. Perbaikan arsip - Menambal dan menyambung secara manual <i>Leafcasting</i> <i>Paper splitting</i> dan <i>sizing</i> - Enkapsulasi - Portepel - Deasidifikasi 2. Ruangan perbaikan arsip 3. Perawatan arsip 4. Pengendalian hama.

Data penelitian ini dikumpulkan disajikan secara sistematis dan ilmiah dan sifat analisis data ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data secara deskriptif (Arikunto, 2010). Data yang sudah ditemukan akan dijelaskan secara kualitatif dan menggambarkan hasil penelitian di lapangan dalam bentuk penyajian data, kemudian tahap analisis data untuk kemudian ditarik poin-poin kesimpulan. Untuk itu, teknik analisis data penelitian ini terdiri dari empat langkah, yaitu langkah pengumpulan data dari berbagai sumbernya, langkah reduksi dan penyederhanaan data, langkah penyajian data atau data *display*, dan langkah terakhir penarikan kesimpulan.

3. LANDASAN TEORI

Evaluasi

Istilah evaluasi merupakan kata yang diserap dari bahasa Inggris, yaitu *evaluation*, secara harfiah/etimologi berasal dari akar kata *value*, artinya nilai (Echols & Shadily, 1992). Selanjutnya kata *value* membentuk kata *avaluation* yang menurut para ahli, seperti Fitzpatrick, Sanders, dan juga Worthen, adalah: "*evaluation as the identification, clarification, and application of defensible criteria to determine an evaluation object's value (worth or merit) in relation to those criteria*", arti dari definisi tersebut adalah evaluasi sebagai suatu identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria yang bisa dipertahankan untuk menentukan nilai dari objek evaluasi (layak atau tidak layak) di dalam kaitannya dengan kriteria tersebut (Widodo, 2021). Evaluasi adalah sebagai kegiatan untuk mengetahui perbedaan dan selisih antara sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Ambiyar & Muharika, 2019).

Tujuan umum evaluasi program ialah menyediakan solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan penting. Adapun peran evaluasi program ialah upaya menekankan pada cara-cara menggunakan jawaban atau solusi yang diperoleh. Dalam hal ini, evaluasi program dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi penting untuk pengembangan program.
2. Untuk mengambil keputusan mengenai keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan (Divayana, 2018).

Selain dua tujuan di atas, pelaksanaan kegiatan evaluasi suatu program juga memiliki tujuan formatif dan tujuan sumatif. Tujuan dan fungsi formatif adalah evaluasi dilakukan untuk perbaikan serta pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk, dan lain sebagainya). Adapun tujuan atau fungsi sumatif ialah evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan

seleksi atau lanjutan. Jadi, evaluasi hendaknya membantu kegiatan pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, seleksi, motivasi, pertanggungjawaban, menambah pengetahuan dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat (Safitri dkk., 2024). Adapun menurut Mukhlis Yunus dan kawan-kawan, tujuan evaluasi ada empat, yaitu:

1. Untuk menilai kemahiran individu dalam menguasai kompetensi.
2. Mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul.
3. Untuk mengukur efisiensi serta efektivitas media, metode, dan sumber daya.
4. Untuk memberikan informasi penting untuk memperbaiki kekurangan (Yunus dkk., 2024).

Preservasi Arsip

Kegiatan preservasi arsip merupakan kegiatan yang tidak dipisahkan pada saat mengelola arsip-arsip di lembaga kearsipan. Mengingat pentingnya preservasi ini, maka kegiatan preservasi dimasukkan sebagai salah satu tugas penting adanya lembaga kearsipan, yaitu sebagai pihak yang melakukan proses perawatan dan pemeliharaan arsip. Istilah preservasi arsip tersusun dari dua kata. Preservasi adalah istilah yang diserap dari bahasa Inggris, yaitu *preservation*, artinya pemeliharaan atau pengawetan (Anwar & Jabbar, 2024), penjagaan, dan perlindungan. Adapun istilah arsip ialah suatu warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan bisa secara cepat ditemukan kembali.

Dalam makna yang lainnya, arsip merupakan simpanan surat-surat penting, dokumen tertulis yang mempunyai nilai historis, disimpan dan juga dipelihara di tempat khusus untuk referensi (Mulyadi, 2023). Preservasi atau pelestarian arsip ialah proses dan kerja di dalam rangka perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak dan restorasi/reparasi arsip yang rusak atau arsip yang rusak (Roeliana & Yogopriyatno, 2023). Preservasi arsip sebagai upaya dalam menyelamatkan arsip yang dilaksanakan dalam rangka untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis (Trisiyani & Tuginem, 2020).

Secara umum kegiatan preservasi ini mempunyai dua tujuan, yaitu:

1. Mencegah kerusakan arsip dari faktor internal dan eksternal.
2. Memperbaiki, merawat arsip yang rusak atau kondisinya memburuk.
3. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam preservasi arsip adalah sebagai berikut:
4. Mencakup pemberian lingkungan yang stabil bagi semua jenis arsip
5. Menggunakan metode-metode penanganan, penyimpanan yang aman
6. Menduplikasi bahan-bahan yang tidak stabil ke suatu media yang stabil
7. Menyimpan arsip ke dalam tempat yang terbuat dari bahan yang stabil, seperti bok arsip yang terbuat dari bahan karton yang bebas asam
8. Memperbaiki arsip atau dokumen untuk melestarikan keasliannya atau format asli mereka
9. Membuat program kontrol terhadap serangan perusak, misalnya rayap
10. Menyiapkan rencana untuk kesiapan dan respon terkait kemungkinan terjadinya bencana (Trisiyani & Tuginem, 2020).

Pelaksanaan kegiatan preservasi arsip memiliki beragam bentuk. Dilihat dari sudut pandang kegiatan yang dilakukan, maka preservasi arsip dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu langsung dan tidak langsung. Preservasi langsung ialah menyediakan prasarana serta sarana perlindungan arsip, termasuk bangunan, metode, kegiatan penyimpanan arsip dan perbaikan fisik. Adapun preservasi tidak langsung adalah mengusahakan substitusi atau alih media, melakukan penggandaan dan alih media ke *microfilm* atau kaset video, kaset rekaman suara, dan lain-lain (Roeliana & Yogopriyatno, 2023). Preservasi arsip atau perlindungan arsip ini bagian dari kegiatan perawatan dan pengamanan arsip baik itu secara fisik ataupun secara non fisik. Bentuk-bentuk lain dari preservasi arsip tersebut bisa dilakukan dalam bentuk tindakan preventif maupun restorasi. Tindakan preventif ialah sebuah upaya

mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan arsip. Adapun yang dimaksud dengan restorasi ialah suatu upaya dalam memperbaiki arsip yang mengalami kerusakan (Sutirman, 2020).

Arsip Statis

Dilihat dari aspek fungsionalitasnya, arsip dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk umum, yaitu arsip dinamis dan statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang dipergunakan oleh lembaga atau instansi tertentu secara langsung dalam perencanaan program kerja, pelaksanaan atau eksekusinya, serta penyelenggaraan sebuah kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan kehidupan bernegara (Asriel dkk., 2016). Arsip statis ialah kebalikan dari arsip dinamis, yaitu arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam proses perencanaan program kerja, ataupun pelaksanaan dan eksekusi, serta penyelenggaraan kehidupan di dalam kaitan dengan konteks administrasi negara. Arsip statis secara khusus sangat erat dengan arsip yang dibuat dan diciptakan oleh pencipta arsip. Keberfungsian arsip statis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena beberapa tinjauan, yaitu karena mempunyai nilai guna kesejarahan, selanjutnya karena telah habis retensinya, dan ada pernyataan berketerangan dipermanenkan, yang secara langsung dilakukan verifikasi, di mana verifikasi arsip tersebut baik dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung oleh Banda Arsip Nasional Negara Republik Indonesia atau lembaga kearsipan yang bersangkutan (Rosalin, 2017).

Arsip statis merupakan sebagai suatu arsip yang pada dasarnya tidak lagi ada penggunaan terhadapnya, atau tidak dipakai dan dipergunakan lagi secara langsung oleh lembaga tertentu yang menciptakan arsip dalam proses perencanaan, penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Meski tidak digunakan secara langsung arsip statis ini tetap disimpan secara baik, karena memiliki nilai kesejarahan bagi suatu masa tertentu (Sutirman, 2020). Lebih lanjut menurut Sattar, bahwa yang dimaksudkan dengan arsip statis ialah arsip yang keberfungsian sebetulnya tidak lagi dipakai secara langsung di dalam suatu perencanaan dan juga penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak pula digunakan secara langsung dalam proses dan juga kegiatan administrasi negara (Sattar, 2019). Senada dengan itu, menurut Sri Mutma'innah dan kawan-kawan, bahwa arsip statis adalah arsip yang dari aspek keberfungsian memiliki nilai guna kesejarahan dan nilai yang berkelanjutan, kemudian telah dinyatakan sebagai arsip yang retensinya telah habis, dan permanen (Mutmainnah, 2020).

Definisi arsip statis telah dikemukakan secara baku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Kemudian, ditemukan juga di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, khususnya di dalam Pasal 1 butir 7:

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional RI dan/atau lembaga kearsipan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa arsip statis ini memiliki nilai kesejarahan dan penyimpanan atas arsip tersebut langka sehingga retensinya telah habis. Menurut Nooryani, karena arsip statis bernilai kesejarahan dan jumlah atau pembuatannya oleh pembuat arsip juga sangat terbatas dan dalam waktu yang tertentu maka perlakuan terhadap arsip statis ini berbeda dengan arsip yang lainnya. Arsip statis tidak boleh hilang atau rusak, karena arsip tersebut memiliki sisi nilai kesejarahan di masa lalu dan menjadi bahan bagi keperluan di masa mendatang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Preservasi Arsip Statis yang Dilakukan Instansi DPKA Kabupaten Aceh Besar

Proses preservasi arsip statis yang dilakukan oleh setiap lembaga kearsipan barangkali sama antara satu dengan yang lainnya, mulai dari proses perencanaannya hingga pelaksanaan preservasi. Setiap lembaga memiliki tata cara tersendiri dalam pelaksanaan preservasi arsip ini. DPKA Aceh Besar melaksanakannya dengan cara preservasi preventif dan preservasi kuratif. Keberadaan arsip statis di DPKA Aceh Besar telah dikelola sejak DPKA ini berdiri pada tahun 2001. Sejauh ini, jumlah arsip yang dikelola oleh DPKA Aceh Besar sebanyak 700 dokumen, dan dokumen-dokumen arsip tersebut khusus dari satu lembaga yaitu hasil akuisisi dari Dinas Pertambangan Aceh Besar (Abdul Latif, Wawancara: 13 Mei 2024). Sementara lembaga dan dinas terkait lainnya yang bekerja sama dengan DPKA di Kabupaten Aceh Besar ialah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Besar. Ulasan serupa juga dikemukakan oleh Citra Dewi, bahwa jumlah arsip secara keseluruhan sebanyak 1.000 arsip lebih, dan khusus untuk arsip statis, sekitar 700 arsip. Sebelum melakukan preservasi arsip statis, langkah-langkah awal yang dilaksanakan adalah melakukan evaluasi untuk memastikan kelayakan arsip:

"Proses preservasi dilakukan setelah dilakukan evaluasi terkait kelayakan arsip yang akan dipreservasi" (Citra Dewi, Wawancara: 19 Januari 2025).

Menurut Abdul Latif (Wawancara: 19 Januari 2025), Kepala Bidang Pengolahan Kearsipan DPKA Kabupaten Aceh Besar, proses preservasi arsip statis dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan langkah-langkah yaitu, proses pemilahan berkas arsip dan pemilihan media simpanan, menyampul arsip agar dokumen tersimpan rapi, diikat menggunakan benang jagung, memberikan penomoran sesuai isi dokumen, inventarisasi dan dimasukkan ke dalam box arsip, dan penyimpanan arsip di ruangan ber AC atau ruangan dingin.

Sejauh penelitian, ada dua kegiatan preservasi yang dilakukan oleh DPKA Aceh Besar yang dilakukan di dalam proses preservasi arsip statis, yaitu aspek preventif dan kuratif:

Tabel 2. Kegiatan Preservasi di DPKA Aceh Besar

No.	Bentuk Preservasi	Keterangan
1	Preventif	Pencegahan agar arsip statis tetap terjaga
2	Kuratif	Tindakan merawat langsung arsip yang telah rusak

1. Preservasi Preventif

Preservasi (pemeliharaan dan perawatan) secara preventif merupakan segala upaya yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan arsip melalui penyediaan sarana, perlindungan arsip, serta metode pemeliharaan arsip. Di dalam keterangan Abdul Latif dikemukakan bahwa aspek preventif pada proses preservasi arsip statis mencakup penempatan arsip dengan cara yang baik, serta ruang penyimpanan arsip, serta penanganan hama. Dalam penjelasannya dapat dipahami sebagai berikut:

"Proses pelaksanaan preservasi arsip statis di DPKA Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan alur yaitu arsip statis disimpan pada depot arsip ataupun tempat penyimpanan, dan arsip diletakkan dalam rak laci yang diberi pelabelan sesuai dengan isi khazanah arsip. Kegiatan ini terkait erat dengan preservasi preventif yang kegiatannya seputar perawatan terhadap arsip yang masih pada kondisi baik" (Abdul Latif, Wawancara: 13 Mei 2024).

Keterangan lainnya disebutkan oleh Citra Dewi, bahwa preservasi arsip statis dalam bentuk preventif berhubungan dengan aspek pencegahan. Di dalam penjelasannya disebutkan:

"Preservasi arsip statis berbentuk preventif ini mencakup beberapa hal, seperti tempat penyimpanan arsip yang memadai. Meskipun saat ini tempat atau lokasi depot dan ruangan penyimpanan terbatas, tetapi aspek penyimpanan ini sangat penting dalam preservasi preventif ini termasuk kondisi ruangan yang harusnya cukup cahaya. Selain itu penanganan arsip, pengendalian hama, perencanaan menghadapi bencana" (Citra Dewi, Wawancara: 19 Januari 2025).

Keterangan lainnya juga dikemukakan oleh Putri, karyawan pada DPKA Aceh Besar:

"Preservasi preventif ini terkait mencegah agar arsip terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh banyak faktor, misalnya debu, kelembaban air, kondisi cahaya. Karena itu, di DPKA ini ada ruangan tempat penyimpanan arsip, box, dan yang lainnya yang digunakan untuk menyimpan arsip statis" (Putri, Wawancara: 19 Januari 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa aspek preventif dari proses preservasi arsip statis ini lebih menekankan pada pengelolaan kondisi dalam ruangan. Sekiranya dianalisis di dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis, ditemukan 6 (enam) hal yang terkait dengan preservasi arsip statis secara preventif. Pada Perka ANRI tersebut dinyatakan bahwa preservasi preventif adalah preservasi yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan arsip, melalui penyediaan prasarana dan juga sarana, perlindungan arsip, serta metode pemeliharaan arsip. Preservasi preventif ini meliputi enam aspek yaitu penyimpanan arsip, penanganan arsip, pengendalian hama terpadu, akses, reproduksi, serta perencanaan menghadapi bencana.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa proses preservasi preventif yang ideal yang ditetapkan di dalam Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2011 dilakukan dengan enam langkah penting, mulai dari konteks tempat atau ruang penyimpanan arsip, penanganan arsip, pengendalian hama, akses, reproduksi, serta perencanaan menghadapi bencana. Namun begitu, sejauh penelitian yang peneliti lakukan, proses preservasi preventif yang dilakukan oleh DPKA Aceh EBSar belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan oleh karena faktor, di antaranya ruang tempat penyimpanan yang terbatas, tempat penyimpanan juga belum dilengkapi dengan alat pelindung bahaya kebakaran misalnya *heat* atau *smoke detection*, *fire alarm*, *extinguisher*, dan *sprinkler system*. Ruang tempat penyimpanan arsip juga belum dilengkapi dengan perlengkapan alat pengatur suhu ruangan dan pengukur pencahayaan. Hal ini sebetulnya telah diatur dalam Perka ANRI sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

2. Preservasi Kuratif

Preservasi kuratif merupakan setiap upaya perbaikan dan perawatan terhadap arsip yang mulai sudah rusak ataupun kondisi arsip memburuk, sehingga dapat memperpanjang usia arsip. Dalam kaitan dengan preservasi kuratif di DPKA Aceh Besar, kegiatan kuratif juga dilakukan di dalam bentuk memperbaiki semua arsip yang rusak. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Latif sebagai berikut:

"Terhadap arsip yang sudah rusak dilakukan proses preservasi kuratif, yaitu dengan perbaikan, seperti merekatkan arsip yang sudah sobek dengan bahan perekat khusus, atau membersihkan noda pada arsip" (Abdul Latif, Wawancara: 13 Mei 2024).

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Citra Dewi, yaitu sebagai berikut:

"Kegiatan kuratif ini berkaitan langsung dengan tindakan yang kami lakukan terhadap arsip-arsip yang sudah rusak, misalnya dengan memperbaikinya, dan sekiranya ada arsip yang tidak tersusun, maka kami menyusunnya dengan rapi, dan membersihkannya sekiranya ada debu. Tindakan lainnya seperti mengelem atau merekatkan arsip yang rusak dengan lem atau perekat khusus" (Citra Dewi, Wawancara: 9 Januari 2025).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa proses preservasi kuratif pada DPKA Aceh Besar ini tampak terbatas pada perbaikan arsip sekiranya arsip terbukti rusak, membersihkan debu, merekatkan arsip dengan alat perekat khusus. Namun, sekiranya dilihat dari teori preservasi kuratif dan peraturan yang dimuat pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, maka ada 4 (empat) hal yang harus diperhatikan, yaitu deadifikasi (menetralkan asam kertas yang merusak kertas dan memberi bahan penahan *buffer* untuk melindungi kertas dari pengaruh asam dari luar), dan *leafcasting* (yaitu perbaikan arsip), *paper splitting* dan *sizing* (yaitu metode perbaikan arsip kertas yang rapuh dengan cara menyelipkan kertas penguat di antara bagian di dalam permukaan dan belakang arsip kertas), *sizing* (yaitu memberi lapisan dengan bahan perekat atau bahan pengisi), dan keempat adalah enkapsulasi yaitu salah satu perbaikan arsip kertas yang rapuh dan sering digunakan dengan bahan pelindung dengan cara lembar arsip dilapisi dua lembar plastik poliester dengan bantuan *double tape*.

Sejauh penelitian, tindakan kuratif yang sudah dilaksanakan DPKA Aceh Besar hanya dalam bentuk *sizing* (merekatkan dengan bahan perekat) dan enkapsulasi (lembar arsip dilapisi dua lembar plastik poliester dengan bantuan *double tape*). Sementara untuk kategori deadifikasi serta *leafcasting* tidak dilakukan karena kekurangan bahan dan peralatan yang dibutuhkan oleh DPKA Aceh Besar. Hal ini tentu akan menghambat dalam proses preservasi arsip statis. Dalam prosesnya, DPKA Aceh Besar memerlukan berbagai peralatan khusus di dalam menunjang proses preservasi yang maksimal. Selain itu, preservasi arsip statis pada DPKA Kabupaten Aceh Besar belum punya buku panduan dan *leaflet* khusus tentang berbagai topik preservasi, seperti kegiatan rutin dan panduan di dalam membersihkan arsip statis dan ruang penyimpanan atau kegiatan survei pengecekan kondisi arsip dan sejenisnya. Selain itu, preservasi arsip statis juga tidak memiliki jadwal khusus dilakukannya perbaikan/perawatan dengan segera setelah terjadi kerusakan (Abdul Latif, Wawancara: 13 Mei 2024).

Kendala yang Dihadapi DPKA Kabupaten Aceh Besar saat Melaksanakan Preservasi Arsip Statis

Preservasi arsip statis merupakan salah satu bagian kegiatan penting di dalam pengelolaan arsip di lembaga kearsipan, di samping beberapa bagian kegiatan yang lain seperti akuisisi arsip, pengolahan, penyediaan layanan akses pemanfaatan oleh masyarakat. Sebagai salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan arsip statis maka kegiatan preservasi yang dilakukan tiap lembaga arsip tentunya punya kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Kendala sebagai segala sesuatu yang menghambat proses pencapaian tujuan tertentu. Kendala sebagai faktor yang membatasi atau

mengurangi kemampuan individu atau organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di dalam konteks preservasi arsip, DPKA Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu organisasi atau instansi pemerintah ketika melaksanakan preservasi arsip statis juga menemukan beberapa kendala baik kendala yang bersifat praktis (proses) dalam melakukan preservasi dan kendala bersifat manajemen kebijakan. Dari hasil wawancara dengan informan, maka peneliti menemukan ada 3 (tiga) kendala yang menghambat proses jalannya preservasi arsip statis di DPKA Kabupaten Aceh Besar, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kendala Pelaksanaan Preservasi Arsip Statis di DPKA Kabupaten Aceh Besar

No.	Kendala		Keterangan
1	Fasilitas, Prasarana	Sarana-	Masih terbatasnya tempat atau ruang penyimpanan arsip
2	Sumber Daya Manusia		Masih terbatasnya sumber daya manusia berupa petugas arsip
3	Anggaran		Masih kurangnya anggaran sehingga sulit untuk memaksimalkan proses preservasi arsip statis

1. Ruang Penyimpanan

Ruang penyimpanan arsip adalah salah satu unsur penting di dalam bidang kearsipan, yaitu sebagai tempat di mana arsip-arsip tersebut disimpan/dirawat dan dilakukan pemeliharaan. Tata letak gedung atau ruang penyimpanan arsip harus efisien serta memenuhi kebutuhan fisik koleksi arsip. Misalnya, rak arsip tidak boleh diletakkan langsung menyentuh dinding dan harus bersifat kering, karena jika tidak maka ruangan dapat menyebabkan kemungkinan kelembapan meningkat, kondensasi, atau kebocoran. Selain itu ruang harus cukup terang dan sinar matahari harus dapat masuk ke ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan harus mempunyai penghawaan (ventilasi) memadai. Ruang simpan arsip harus pula dibersihkan sebagaimana mestinya. Selain itu, hal terpenting lainnya adalah urang penyimpanan arsip statis ini adalah ketersediaan dari ruangan itu cukup untuk menampung arsip yang ada.

Namun demikian, sejauh wawancara yang peneliti lakukan, bahwa ruang penyimpanan arsip statis di DPKA Kabupaten Aceh Besar masih sangat terbatas atau kurang memadai. Hal ini selaras dengan keterangan Citra Dewi, karyawan atau staf di bagian preservasi dan layanan arsip statis DPKA Aceh Besar, salah satu kendala yang dihadapi DPKA Aceh Besar ialah ruang penyimpanan arsip statis masih kurang.

"Saat ini, jumlah ruangan khusus bagian arsip hanya ada dua, yaitu depot arsip dan ruangan layanan bagi masyarakat yang mengakses arsip statis. Untuk ruangan arsip atau depot arsip statis, masih sangat kurang dan sangat terbatas, karena banyak arsip yang bertumpuk sebab tidak cukup ruangan penyimpanannya. Penumpukan arsip ini, ini kan ada banyak arsip yang belum ada tempat. Sekiranya ada cukup banyak tempat, maka tentunya akan banyak arsip yang tertampung, dan pihak DPKA tentu juga akan mengakuisisi banyak arsip lainnya dari lembaga terkait" (Citra Dewi, Wawancara: 19 Januari 2025).

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Mahmuddin, selaku staf pada bagian Preservasi dan Pelayanan Arsip Statis DPKA Aceh Besar, yaitu sebagai berikut:

"Proses kegiatan pengelolaan arsip memang harus didukung pula dengan ketersediaan ruangan yang memadai. Jika untuk pemeliharaan, maka arsip akan mudah dilakukan pemeliharaan, dibersihkan dan hal lain jika didukung dengan ruangan yang cukup. Namun saat ini, kita di sini memang kurang cukup ruangan untuk arsip statis ya, untuk itu hal ini menjadi salah satu kendalanya" (Mahmuddin, Wawancara: 19 Januari 2025).

Hasil observasi (pengamatan) yang peneliti lakukan juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ruang penyimpanan berisi tumpukan arsip yang tidak teratur (Observasi: 13 Mei 2024 dan 19 Januari 2025). Ini artinya bahwa penumpukan arsip statis ini dikarenakan tidak adanya ruang yang cukup. Kurangnya ruangan penyimpanan arsip status tentu akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan arsip khususnya di dalam bidang preservasi arsip statis.

Sekiranya ditinjau dari ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, maka ditemukan di dalamnya bahwa tempat penyimpanan adalah salah satu bagian penting dalam proses preservasi arsip statis. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa tempat penyimpanan arsip disebut dengan depot arsip di mana arsip statis disimpan dalam depot arsip, yakni bangunan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelestarian terhadap arsip yang tersimpan di dalamnya. Peraturan ini memosisikan dan menempatkan kedudukan ruangan penyimpanan arsip atau depot arsip ini sebagai bagian dari bentuk preservasi arsip statis dalam kategori preventif yaitu pencegahan agar arsip-arsip statis dapat terjaga dengan ruangan yang memadai. Namun, hal ini belum maksimal dilakukan di DPKA Aceh Besar. Keterangan sebelumnya menunjukkan bahwa ruangan penyimpanan arsip ataupun depot arsip masih sangat kurang, karena masih terdapat banyak arsip yang terpaksa di susun dan ditumbuk buka pada rak yang khusus menyimpan arsip. Hal tersebut terjadi dikarenakan kekurangan ruangan arsip statis.

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja berkaitan erat dengan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di DPKA Aceh Besar. Ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja (karyawan ataupun staf) pada dasarnya akan sangat membantu proses pelaksanaan preservasi arsip, baik kategori preventif maupun kuratif. Di dalam ketersediaan SDM dapat membantu pelaksanaan preservasi arsip. Ketersediaan SDM dan tenaga kerja sangat penting di dalam pelaksanaan preservasi arsip. SDM yang kompeten seyogyanya hadir untuk mampu membantu memastikan arsip-arsip penting bisa disimpan, dirawat, dan juga dikelola dengan benar.

Alasan pentingnya ketersediaan sumber daya atau tenaga kerja di dalam preservasi arsip statis yaitu dapat menangani dan merawat arsip termasuk teknik konservasi, restorasi arsip yang rentan. Ketersediaan SDM yang memadai, mampu memberi pengawasan serta perawatan rutin terhadap arsip, memastikan bahwa arsip statis tidak rusak oleh faktor-faktor lingkungan seperti kelembaban, suhu di dalam ruangan, pencahayaan. Ketersediaan SDM yang kompeten dapat membantu dalam proses digitalisasi arsip, memastikan arsip-arsip penting dapat diakses secara digital, terlindungi dari kerusakan fisik. Selain itu, ketersediaan SDM atau tenaga kerja ini dapat merespons dengan cepat dan efektif di dalam situasi krisis, seperti bencana alam atau kebakaran, untuk menyelamatkan arsip yang berharga. Karena itulah, dengan adanya SDM yang memadai, cukup, terlatih, pelaksanaan preservasi arsip

dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan menjaga warisan sejarah dan informasi penting untuk generasi mendatang.

Namun, pada kenyataannya, tantangan, kendala dan sekaligus hambatan di dalam proses preservasi arsip statis yang dihadapi DPKA Aceh Besar ini justru masih kurangnya tenaga kerja atau SDM. Ini selaras dengan ulasan Abdul Latif, yaitu Kepala Bidang Pengolahan Kearsipan Kabupaten Aceh Besar bahwa kendala yang dihadapi DPKA Aceh Besar di samping kurangnya ruang ataupun terbatasnya tempat penyimpanan arsip, juga tenaga kerja, karyawan yang masih sangat terbatas.

"Untuk kendalanya sejauh ini mungkin lebih pada ruangan yang masih sangat terbatas dalam menyimpan arsip, atau kita kenal di sini sebagai depot arsip. Selain itu, tenaga kerja atau karyawan, dan sumber daya di dalam pengelolaan arsip secara keseluruhan juga sangat terbatas di sini, termasuk dalam melakukan proses preservasi arsip statis" (Abdul Latif, Wawancara: 19 Januari 2025).

Keterangan lainnya juga dikemukakan oleh Citra Dewi sebagai berikut:

"Kendala lain selain ruang penyimpanan ya mungkin lebih kepada tenaga kerja atau karyawan ya, karena selama ini masih sangat terbatas, pada saat proses preservasi dan pengelolaan arsip statis secara umum tidak cukup hanya dua ataupun tiga orang, tetapi harus membutuhkan beberapa karyawan dan staf ahli bidang preservasi, seperti dalam melakukan pengendalian hama, orang yang bisa mengoperasikan alat-alat digital dan berbagai bahan untuk melindungi arsip" (Citra Dewi, Wawancara: 19 Januari 2025).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa maksimalisasi di dalam proses preservasi arsip statis ini juga sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang memadai atau tenaga kerja yang melakukan tugas preservasi. Dalam konteks ini, tenaga kerja di DPKA Aceh Besar khususnya pada bidang seksi pengolahan dan preservasi arsip statis masih sangat terbatas. Hal ini dapat diketahui dari data yang dihimpun dalam buku yang diterbitkan DPKA Provinsi Aceh di tahun 2022, yang mana salah satu keterbatasan yang hingga saat buku itu diterbitkan (tahun 2022) adalah minimnya tenaga yang ahli bidang pustakawan dan arsiparis ([Pemerintah Aceh, 2022](#)). Hal ini berlanjut pula pada saat peneliti melakukan wawancara dengan informan di DPKA Aceh Besar.

Sekiranya dianalisis dari ketentuan yang dimuat dalam ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis, dikemukakan sumber daya manusia merupakan bagian penting di dalam proses preservasi arsip statis. SDM harus dilakukan pengembangan, yang mana pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan untuk membekali pengetahuan teknis preservasi, pengetahuan tentang permasalahan di dalam preservasi arsip statis, penanganan yang tersedia, penerapan tata cara preservasi yang baik dan penyadaran tentang relevansi, pentingnya pelatihan yang diikuti dengan dedikasi pegawai bagi proses kegiatan preservasi. Artinya, bahwa Perka ANRI No 23 Tahun 2011, telah menentukan bahwa lembaga kearsipan harus didukung dengan adanya SDM yang memadai dan memiliki pengetahuan di bidang preservasi.

Namun, sejauh ini justru keberadaan tenaga kerja atau SDM pada DPKA Aceh Besar masih sangat terbatas. Tampak bahwa di DPKA Aceh Besar cenderung hanya memaksimalkan layanan pada bidang perpustakaan, bukan pada bidang layanan kearsipan. Hal tersebut tampak bahwa DPKA Aceh Besar sering melakukan kegiatan perpustakaan, pengembangan

dan juga pengelolaan koleksi pustaka dibandingkan dengan kegiatan di dalam bidang kearsipan. Hal ini disebabkan akses masyarakat terhadap bahan perpustakaan lebih dominan dari pada layanan kearsipan. Oleh karena itu, penyelenggara atau sumber daya dan tenaga kerja di perpustakaan lebih memadai ketimbang tenaga kerja dan sumber daya manusia bidang kearsipan.

3. Anggaran

Ketersediaan anggaran yang memadai sangat menentukan jalannya satu program dalam satu lembaga. Anggaran yang memadai memungkinkan lembaga untuk melaksanakan program-programnya secara efektif dan efisien. Dalam aspek ini, alasan mengapa ketersediaan anggaran sangat penting karena beberapa alasan, misalnya pembiayaan operasional. Anggaran diperlukan untuk membiayai semua kegiatan operasional, termasuk gaji karyawan, dan kemudian anggaran biaya peralatan, kebutuhan sehari-hari lainnya. Anggaran diperlukan di saat proses pelaksanaan program. Setiap program di dalam suatu lembaga memerlukan dana untuk diimplementasikan, seperti biaya untuk pelatihan, pembelian bahan, dan kegiatan di lapangan. Selain itu, anggaran juga penting di dalam konteks upaya pengembangan dan inovasi. Artinya, dengan ada anggaran yang cukup, lembaga dapat mengembangkan program-program baru dan melaksanakan inovasi untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang dicapai. Ketersediaan anggaran sangat dibutuhkan dalam manajemen krisis. Anggaran yang memadai juga penting untuk manajemen krisis seperti bencana alam dan situasi darurat lainnya yang memerlukan dana tambahan. Dengan anggaran yang memadai, maka satu lembaga dapat menjalankan program-programnya dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses preservasi arsip statis pada DPKA Aceh Besar, kendala ketiga yang ditemukan selain keterbatasan ruangan penyimpanan dan sumber daya manusia ialah kendala dalam masalah anggaran. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Citra Dewi, bahwa kendala lain selain keterbatasan ruang penyimpanan dan tenaga kerja adalah kendala anggaran atau dana, baik gaji karyawan, anggaran di dalam proses preservasi bahkan anggaran untuk membangun ruangan penyimpanan tambahan.

"Kendala lainnya, yang ketiga adalah anggaran, kita masih mengalami hambatan dan kendala dalam anggaran. Saat kita melakukan proses preservasi, kita butuh anggaran yang cukup, seperti gaji karyawan saat proses preservasi, kemudian membeli bahan, alat dan keperluan lainnya untuk menunjang proses preservasi arsip berjalan secara maksimal" (Citra Dewi, Wawancara: 19 Januari 2025).

Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Abdul Latif sebagai berikut:

"Ya, pasti anggaran ya, kita masih sangat terbatas, misalnya gaji, pembelian bahan, alat juga lainnya. Jadi anggaran masih sangat terbatas" (Abdul Latif, Wawancara: 19 Januari 2025).

Penjelasan di atas juga didukung dengan data yang diperoleh dari buku yang diterbitkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tahun 2022, di mana buku ini memuat berbagai kondisi kearsipan di seluruh wilayah Provinsi Aceh, bahwa permasalahan atau kendala yang dihadapi khususnya oleh DPKA Aceh Besar adalah anggaran. Anggaran yang sangat kurang dan belum maksimal hal ini akan berimbas kepada kelancaran kegiatan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Besar ([Pemerintah Aceh, 2022](#)).

Sekiranya dianalisis dalam ketentuan Perka Anri No. 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis, maka ditemukan adanya aturan terkait pentingnya pendanaan, anggaran di dalam proses preservasi arsip statis. Pengalokasian dana secara proporsional sangat penting dilakukan untuk mendukung kegiatan preservasi arsip statis sehingga kebijakan menyangkut preservasi arsip statis dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Namun demikian, DPKA Kabupaten Aceh Besar mengalami keterbatasan dalam anggaran. Terbatasnya anggaran ini sangat dirasakan dalam proses preservasi, misalnya akan sulit untuk menyediakan lokasi dan bangunan tambahan tempat penyimpanan arsip. Sebab, selama ini, kendala yang dihadapi oleh DPKA Aceh Besar juga terkait keterbatasan ruangan atau depot penyimpanan arsip. Sekiranya anggaran memadai, akan mudah memaksimalkan preservasi, membangun ataupun menambah ruang penyimpanan baru, membeli peralatan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana penunjang preservasi, misalnya alat pengatur suhu ruangan, alat pendeteksi api, serta peralatan perbaikan arsip yang rusak dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa proses preservasi arsip statis di DPKA Aceh Besar masih menemukan beberapa kendala yang terangkum dalam tiga pembahasan di awal, yaitu kendala keterbatasan ruang penyimpanan atau depot arsip, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran. Keterbatasan serta kendala ini menghambat jalannya proses preservasi arsip di DPKA Aceh Besar, bukan hanya melaksanakan preservasi preventif ataupun pencegahan terhadap kerusakan, tetapi juga hambatan dalam melakukan penanganan langsung atau preservasi kuratif.

Proses Evaluasi Preservasi Arsip Statis yang Dilakukan Instansi DPKA Kabupaten Aceh Besar

Evaluasi preservasi arsip statis merupakan proses untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki proses preservasi arsip. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan arsip tetap terjaga dan dapat digunakan di masa depan. Preservasi arsip statis bagian pengolahan arsip yang tujuannya agar menjaga kelestarian arsip. Evaluasi preservasi arsip statis juga bagian penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan preservasi dalam upaya pelestarian arsip yang telah dilakukan. Evaluasi penting untuk memastikan bahwa arsip tetap aman dan dapat diakses di masa depan. Sejauh penelitian yang dilaksanakan di DPKA Aceh Besar, evaluasi preservasi arsip statis dilakukan dengan tiga aspek seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Proses Evaluasi Preservasi Arsip Statis yang Dilakukan Instansi DPKA Kabupaten Aceh Besar

No.	Aspek Evaluasi Preservasi Arsip Statis
1	Melakukan identifikasi atas kekurangan di dalam preservasi arsip statis
2	Melakukan pemantauan arsip,
3	Melakukan pencatatan lengkap data arsip

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh DPKA Aceh Besar mencakup upaya identifikasi mengenai kekurangan-kekurangan di dalam proses preservasi arsip yang selama ini sudah dilakukan. Selanjutnya adalah melakukan pemantauan arsip-arsip yang boleh jadi memerlukan perawatan lebih lanjut. Berikutnya adalah melakukan pencatatan data arsip, misalnya jenis, jumlah arsip. Dalam hal ini, Abdul Latif telah menjelaskan ketiga aspek proses evaluasi preservasi arsip ini, yaitu sebagai berikut:

"Proses evaluasi kegiatan preservasi arsip yang telah dilakukan misalnya, kami melakukan penilaian beberapa aspek kekurangan dalam preservasi, sehingga dari hasil penelitian ini telah ditemukan beberapa kendala, misalnya ruang penyimpanan yang kurang memadai, sumber daya yang terbatas dan anggaran. Semua ini diketahui setelah adanya identifikasi kekurangan pada proses preservasi. Selain identifikasi, juga dilakukan proses perbaikan arsip, pemantauan yang dilaksanakan oleh kepala DPKA, termasuk mencatat data arsip" (Abdul Latif, Wawancara: 19 Januari 2025).

Keterangan serupa juga dinyatakan oleh Citra Dewi, bahwa evaluasi yang dilakukan dalam proses preservasi ini tentunya berkaitan dengan penilaian dan koreksi serta perbaikan. Evaluasi ini mencakup identifikasi terhadap kekurangan dalam preservasi arsip statis. Menurut Citra Dewi, hasil identifikasi yang selama ini terhadap kekurangan proses preservasi arsip secara khusus dan juga pengelolaan arsip secara umum adalah ditemukannya beberapa hambatan yang perlu penanganan lebih jauh dan segera. Misalnya, mengenai keterbatasan ruang penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga kerja, serta keterbatasan masalah anggaran (Citra Dewi, Wawancara: 19 Januari 2025). Selain proses penilaian identifikasi kekurangan dalam preservasi arsip statis, evaluasi juga dilakukan dengan pemantauan arsip. Ini dilakukan langsung Kepala Arsip dan Kepala Bidang Pengolahan Kearsipan. Menurut Putri, proses evaluasi ini termasuk pemantauan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala arsip serta kepala bidang pengolahan arsip. Caranya adalah dengan meninjau dan memantau langsung ke ruang arsip (Putri, Wawancara: 19 Januari 2025).

Proses evaluasi berikutnya mencatat dan mendata lengkap data arsip. Proses ini dilakukan untuk mengetahui jumlah arsip statis yang sudah di preservasi, termasuk mendata jumlah arsip yang rusak, sehingga proses pelaksanaan preservasi pada kali berikutnya bisa dilakukan secara maksimal. Sejauh ini, pihak DPKA Aceh Besar memang belum melaksanakan langkah mengajukan anggaran, terutama dalam pembangunan ruangan penyimpanan arsip statis serta anggaran untuk kelengkapan sarana dan prasarana ruang arsip. Biasanya, anggaran tersebut diajukan bersamaan dengan rumus Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hanya saja, khusus anggaran untuk kegiatan preservasi, terutama anggaran pembangunan ruang penyimpanan dan juga sarana dan prasarana perlengkapan dalam proses preservasi arsip belum diajukan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis pembahasan, maka dapat disimpulkan pada tiga poin: *Pertama*, proses preservasi arsip statis dilaksanakan di instansi DPKA Kabupaten Aceh Besar terdiri dari dua proses, yaitu preservasi preventif dan preservasi kuratif. Preservasi arsip statis preventif mencakup penyediaan tempat/ruang penyimpanan arsip, penanganan arsip, pengendalian hama dan perencanaan menghadapi bencana. Preservasi kuratif dilakukan melalui penanganan arsip rusak, memperbaiki, menyusun arsip, membersihkan, mengelem atau merekatkan arsip. Dianalisis dari Perka ANRI No. 23 Tahun 2011, maka proses preservasi preventif yang dilakukan oleh DPKA Aceh Besar belum sepenuhnya maksimal, karena faktor ruang tempat penyimpanan terbatas, belum dilengkapi dengan pelindung bahaya kebakaran *heat, smoke detection, fire alarm, extinguisher*, dan *sprinkler system*. *Kedua*, kendala yang dihadapi DPKA Kabupaten Aceh Besar saat melaksanakan preservasi arsip statis ada tiga, yaitu keterbatasan tempat ruangan penyimpanan arsip/depot arsip, tenaga kerja atau sumber daya manusia, dan juga anggaran. *Ketiga*, evaluasi preservasi arsip statis yang dilakukan oleh instansi DPKA Kabupaten Aceh Besar dengan tiga aspek, yaitu identifikasi atas kekurangan dalam preservasi arsip statis, pemantauan arsip, pencatatan lengkap data arsip.

Berdasarkan temuan tersebut maka direkomendasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu mengembangkan pengelolaan arsip di DPKA Aceh Besar, termasuk mengalokasikan anggaran untuk menangani beberapa kendala yang dihadapi DPKA Aceh Besar dalam pengelolaan arsip. DPKA Aceh Besar juga perlu melaksanakan proses preservasi arsip dengan maksimal. DPKA dapat mengajukan anggaran kepada pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Hal ini untuk mendukung pengelolaan arsip di DPKA Aceh Besar menjadi lebih maksimal.

REFERENSI

- Ambiyar, & Muharika. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Bandung: Alfabeta.
<https://books.google.co.id/books?id=w37LEAAQBAJ>
- Amsyah, Z. (2005). *Manajemen Kearsipan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
<https://books.google.so/books?id=unmMvOU4HZ8C>
- Anwar, M., & Jabbar, F. (2024). *Manajemen Perpustakaan: Transformasi Perpustakaan Menuju Pelayanan Berbasis Digital*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asriel, A. S., Armianti, & Frista, L. (2016). *Manajemen Kantor*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Caroline, D. A., Ismanto, B., & Rina, L. (2022). Implementation of digital archives using a dynamic archive information system. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 10(2), 189-204. DOI 10.24198/jkip.v10i2.33203
- Divayana, D. G. H. (2018). *Evaluasi Program*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1992). *Kamus Indonesia Inggris* (Edisi Ketiga,). Gramedia Pustaka Utama.
- Hendrawan, M. R., & Ulum, M. C. (2017). *Pengantar Kearsipan: Dari Isu Kebijakan ke Manajemen*. Malang: UB Press.
<https://books.google.co.id/books?id=scdVDwAAQBAJ>
- Jaillant, L. (2022). How can we make born-digital and digitised archives more accessible? Identifying obstacles and solutions. *Archival Science*, 22(3), 417-436. DOI 10.1007/s10502-022-09390-7
- Masanya, T. M., & Ngulube, P. (2021). Digital preservation systems and technologies in South African academic libraries. *South African Journal of Information Management*, 23(1), 1-11. DOI 10.4102/sajim.v23i1.1249
- Matlala, M. E., Ncube, T. R., & Parbanath, S. (2022). The state of digital records preservation in South Africa's public sector in the 21st century: a literature review. *Records Management Journal*, 32(2), 198-212. DOI 10.1108/RMJ-02-2021-0004
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
<https://books.google.co.id/books?id=OwPwDwAAQBAJ>

- Mulyadi. (2016). *Pengelolaan Arsip Berbasis Otomasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi. (2023). *Pengelolaan Arsip Berbasis Otomasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada - Rajawali Pers. <https://books.google.co.id/books?id=yGffEAAAQBAJ>
- Mutmainnah, S. (2020). *Manajemen Arsip*. Yayasan Menulis.
- Pemerintah Aceh. (2022). *Profil Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Se-Aceh*,. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=9
- Rahman, Y. N., & Arfa, M. (2021). Perawatan Arsip Statis Tekstual Guna Memperpanjang Umur Arsip di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Semarang. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 5(4), 657-670. DOI [10.14710/anuva.5.4.657-670](https://doi.org/10.14710/anuva.5.4.657-670)
- Rakemane, D., & Mosweu, O. (2021). Challenges of managing and preserving audio-visual archives in archival institutions in Sub Saharan Africa: a literature review. *Collection and Curation*, 40(2), 42-50. DOI [10.1108/CC-04-2020-0011](https://doi.org/10.1108/CC-04-2020-0011)
- Ria, G. T., & Irhandayaningsih, A. (2019). Peran Arsiparis dalam Melakukan Preservasi Arsip Statis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(1), Article 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/26781>
- Roeliana, L., & Yogopriyatno, J. (2023). *Kearsipan*. Penerbit Adab.
- Rosalin, S. (2017). *Manajemen Arsip Dinamis*. Malang: UB Press. <https://books.google.co.id/books?id=ITNTDwAAQBAJ>
- Rusidi. (2019). *Teknik Penyusunan Jadwal Retensi Arsip*. Yogyakarta: Deepublish.
- Safitri, I., Imtikhanah, R. D. N. W., Akbarini, N. R., Sari, M. W., Fitrah, M., Ilyas, Sista, T. R., Setyono, I. D., Setyaningtyas, R. F., & Ndayizeye, O. (2024). *Teori Pengukuran dan Evaluasi*. Ruang Tentor. https://books.google.co.id/books?id=NWf_EAAAQBAJ%20
- Sattar. (2019). *Manajemen Kearsipan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Septiani, P., Batubara, A. K., & Ali, M. N. (2024). Analisis Preservasi Arsip Statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(2), 39-59. DOI [10.55606/jpbb.v3i2.3043](https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i2.3043)
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. 8.). Bandung: Alfabeta.
- Sutirman. (2020). *Administrasi Kearsipan di Era Teknologi Informasi*. Yogyakarta: UNY Press. <https://books.google.co.id/books?id=BwMREAAAQBAJ>
- Tintswalo, S., Mazenda, A., Masiya, T., & Shava, E. (2022). Management of records at Statistics South Africa: Challenges and prospects. *Information Development*, 38(2), 286-298. DOI [10.1177/0266666920981680](https://doi.org/10.1177/0266666920981680)

- Trisiyani, R., & Tuginem. (2020). *Kearsipan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Widodo, H. (2021). *Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: UAD Press.
<https://books.google.co.id/books?id=sEFXEAAAQBAJ>
- Wright, K., & Laurent, N. (2021). Safety, collaboration, and empowerment: trauma-informed archival practice. *Archivaria*, (91), 38-73. DOI10.7202/1078465ar
- Yunus, M., Ibrahim, M., Musnadi, S., Akmal, Buchari, A. M., Marzuki, Maihani, S., Syauqi, T. M., Harahap, R. E., Chaidir, Afrizal, Sawitri, R., & Adnan. (2024). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. <https://books.google.co.id/books?id=RnADwAAQBAJ>